
**ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PEMENUHAN
AKSEBILITAS PELAYANAN DASAR DI KOTA SERANG**

**ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN MEETING BASIC
SERVICE ACCESSIBILITY IN THE CITY OF SERANG**

Fitria Wulandari¹, Hilda Rahmawati², Ihdan Fadli³

Administrasi Negara, Universitas Pamulang^{1,2,3}

email : fitriwulandari1004@gmail.com¹, hildarahmawatihilda@gmail.com², ihdanfadli08@gmail.com³

Accepted: Dec, 28th 2025 Published: Dec, 30th 2025

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Adapun terdapat infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan transportasi. Berdasarkan hasil analisis, meskipun pembangunan infrastruktur fisik di Kota Serang telah berkembang pesat selama sepuluh tahun terakhir, masih ada perbedaan signifikan antara daerah pusat seperti Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya dengan daerah pinggiran seperti Kasemen dan Taktakan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dana, koordinasi yang kurang baik antarinstansi terkait, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan di bidang air bersih dan sanitasi juga belum merata, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan manajemen tata kelola daerah, integrasi kebijakan tata ruang, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta agar pelayanan dasar di Kota Serang dapat tercapai secara merata, efisien, dan adil.

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Aksesibilitas, Pelayanan Dasar, Pemerataan Wilayah.

ABSTRACT

Infrastructure development plays a crucial role in improving public welfare and accelerating equitable development across various regions, including Serang City, the capital of Banten Province. Infrastructure is a crucial factor in expanding access to basic services such as education, health, clean water, sanitation, and transportation. The analysis reveals that while physical infrastructure development in Serang City has progressed rapidly over the past ten years, significant disparities remain between central areas such as Serang and Cipocok Jaya Districts and outlying areas such as Kasemen and Taktakan. Key challenges include limited funding, poor coordination between relevant agencies, and low community participation in the development process. Development in the field of clean water and sanitation is also uneven, particularly in densely populated areas. Therefore, a more inclusive and sustainable development approach is needed through strengthening regional governance, integrating spatial planning policies, and collaborating with the government and the private sector to ensure equitable, efficient, and equitable access to basic services in Serang City.

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur memiliki peranan strategis sebagai suatu penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan infrastruktur yang memadai, mobilitas barang, jasa dan manusia dapat berjalan dengan lebih efisien, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan produktivitas daerah menjadi lebih tinggi (Andi Ahmad Haidi, 2023). Selain itu, infrastruktur yang baik menciptakan konektivitas antarwilayah yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur juga menjadi salah satu penentu utama dalam penyediaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan perumahan (Yasir Arafat, 2025). Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pelayanan dasar tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Seperti ketersediaan jaringan jalan dan transportasi publik tentunya mempengaruhi akses masyarakat terhadap sekolah dan rumah sakit. Demikian pula dengan pembangunan sistem air bersih dan sanitasi yang baik merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Selain berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur juga tentunya mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan infrastruktur seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah perkotaan dan perdesaan (Andi Ahmad Haidi, 2023). Oleh karena itu, dengan adanya penguatan infrastuktur menjadi langkah penting untuk dapat menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional seperti RPJMN (Rencana Jangka Menengah Nasional) menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, yang dimana hal ini berfokus kepada peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar, efisiensi logistik serta peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan untuk dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama dalam aspek infrastruktur berkelanjutan dan pelayanan publik yang merata. Dalam konteks daerah, keberhasilan pembangunan infrastruktur akan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang kebijakan yang tepat serta dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten tentunya memiliki peran yang penting dan strategis untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di wilayah barat Pulau Jawa. Sebagai kota yang relatif muda. Kota Serang masih terus

berproses dalam pembangunan infrastruktur dasar yang mampu untuk menopang dinamika pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat (Tiwi Rizkiyani, 2025). Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan berbagai macam program untuk pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, perbaikan fasilitas publik serta pengembangan kawasan permukiman. Secara geografis, Kota Serang memiliki posisi yang menguntungkan karena berada di jalur utama yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah barat Jawa. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Serang sebagai pusat kegiatan provinsi. Namun, dalam praktiknya pembangunan infrastruktur di Kota Serang masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan dana pembangunan, perencanaan yang belum terpadu dan kurangnya pengawasan terhadap kualitas proyek.

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Kota Serang juga belum merata, sekolah-sekolah yang berada di pusat kota memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan sekolah-sekolah di wilayah perbatasan. Kemudian, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit hanya berfokus di daerah perkotaan dibandingkan di perbatasan. Oleh karena itu, evaluasi sangat diperlukan secara menyeluruh terhadap arah dan kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Serang dengan menganalisis secara komprehensif akan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan efektivitas anggaran serta memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan dasar (Solu Nor Amaya, 2024).

Aksebilitas pelayanan dasar di Kota Serang masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Meskipun beberapa kawasan pusat kota seperti Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya memiliki akses yang relative baik terhadap pendidikan, kesehatan dan air bersih, di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Hal ini terlihat dari minimnya jalan yang layak, terbatasnya transportasi publik serta kurangnya fasilitas sosial di beberapa kelurahan. Dalam sektor pendidikan, sebagian masyarakat di daerah perbatasan masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapat sekolah menengah atau perguruan tinggi. hal ini disebabkan oleh persebaran dalam lembaga pendidikan belum merata serta kurangnya sarana transportasi yang mendukung. Kondisi seperti ini tentunya berpotensi dalam menurunkan angka partisipasi sekolah, terutama di kalangan masyarakat dalam penghasilan rendah. Dalam layanan kesehatan juga mengalami permasalahan serupa, karena beberapa wilayah masih kekurangan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas pembantu atau posyandu yang aktif. Oleh karena itu, masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan diperburuk dengan infrastruktur jalan yang rusak dan kurangnya transportasi umum terutama di wilayah pedesaan.

Layanan air bersih dan sanitasi juga masih menjadi permasalahan yang utama, karena cakupan layanan PDAM Kota Serang masih terbatas dan masih banyaknya masyarakat pinggiran yang mengandalkan sumur atau air tanah yang kualitasnya tidak selalu terjamin yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Aksebilitas pelayanan dasar yang belum optimal menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terarah dan merata. Tanpa intervensi yang tepat, ketimpangan antarwilayah akan selalu meningkatkan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Pemerintah Kota Serang seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Salah satu tantangan utama yaitu keterbatasan anggaran daerah (Tiwi Rizkiyani, 2025). Karena sebagian besar sumber pendanaan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan kapasitas pendapatan asli daerah yang masih relatif kecil. Selain keterbatasan dana, perencanaan pembangunan seringkali belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan lemahnya sistem perencanaan partisipatif menyebabkan sebagian pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Akibatnya infrastruktur yang dibangun tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan aksebilitas pelayanan dasar. Permasalahan lain terkait lembahnya aspek pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur. Masih banyaknya fasilitas publik yang mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan rutin dan pengawasan teknis. Kondisi seperti ini menimbulkan inefisiensi anggaran karena pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pembangunan ulang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu inisiatif strategis yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dirancang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penduduk, baik dari segi akses terhadap sumber daya maupun kesempatan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Artha 2013 dalam (Di & Kotamobagu, 2022) yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Salah satu pembangunan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur di mana dapat mendorong kemajuan suatu daerah yang lebih baik. pembangunan infrastruktur merupakan investasi penting dalam jangka panjang untuk menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur berperan krusial dalam mendukung aksesibilitas terhadap layanan dasar yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus

berkelanjutan dan terencana dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan, tanpa hambatan yang berarti. Penyediaan infrastruktur publik mencakup berbagai kegiatan konstruksi yang bertujuan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, mengelola, atau memelihara infrastruktur agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penyediaan infrastruktur ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang semakin meningkat. Laju pertumbuhan pemukiman di wilayah pinggiran belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Oleh karena itu muncul kawasan permukiman yang padat dan kumuh yang minim dalam pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut pemerintah Kota Serang perlu memperkuat kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan infrastruktur. Pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dapat menjadi salah satu solusi yang strategis dalam mempercepat pemenuhan aksesibilitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, layanan infrastruktur dapat dianggap sebagai bentuk layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Layanan ini dirancang sebagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, atau tuntutan masyarakat, sebagaimana dinyatakan (Ndraha, 2003) dalam (Rizkiyani & Rahayu, 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa infrastruktur tidak hanya dibangun secara fisik tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Banten merupakan wilayah yang strategis di Indonesia, yang menunjukkan komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Provinsi Banten tidak hanya menciptakan sistem pelayanan dasar yang efektif dan efisien, tetapi juga dapat menjangkau secara merata ke seluruh lapisan masyarakat bahkan hingga daerah terpencil.

Urgensi penelitian ini juga didasar oleh perlunya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat melalui RPJMN menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi pembangunan infrastruktur pada tingkat daerah seperti Kota

Serang menjadi langkah strategis untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan, sekaligus untuk dapat memastikan keselarasan antara target nasional dan pelaksanaan di daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas pelayanan dasar di Kota Serang. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan pembangunan Kota Serang periode 2019–2024.

Data dianalisis melalui proses reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan, untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap pemerataan pelayanan dasar serta mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan wilayah, dan pengelolaan tata ruang. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kebutuhan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan infrastruktur di Kota Serang dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, terutama sejak penetapan Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. Pemerintah daerah memberikan prioritas yang besar pada penguatan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tercermin dari RPJMD Kota Serang 2023–2026, di mana sektor infrastruktur memperoleh porsi anggaran terbesar dalam belanja modal daerah. Pembangunan jalan antar-kecamatan menjadi fokus utama, dan sekitar 72% kondisi jalan saat ini berada dalam keadaan baik, terutama di Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, dan Curug. Namun demikian, ketimpangan masih terlihat di wilayah Kasemen dan Walantaka yang menghadapi infrastruktur jalan kurang layak, sehingga masyarakat mengalami kendala akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Dalam hal utilitas dasar, perluasan akses air bersih oleh PDAM Tirta Albantani telah menjangkau sekitar 58% rumah tangga. Meski demikian, sebagian masyarakat masih bergantung pada sumur bor atau sumber air tanah. Permasalahan sanitasi juga menjadi isu serius, terutama di daerah pinggiran yang belum ditopang dengan sistem drainase dan pengelolaan limbah memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko kesehatan lingkungan dan penyakit berbasis air. Di sisi lain, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan turut dilakukan, meskipun distribusinya masih berpusat di wilayah perkotaan. Daerah padat penduduk di pinggiran kota masih kekurangan puskesmas pembantu serta tenaga medis, dan masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan menengah.

Sosial dan ekonomi, pembangunan infrastruktur berdampak besar terhadap mobilitas warga, distribusi barang dan jasa, dan peluang usaha baru. Infrastruktur seperti pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya mendorong dinamika ekonomi terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Namun, manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata. Wilayah pusat kota mengalami pertumbuhan ekonomi lebih pesat dibanding pinggiran yang masih tertinggal akibat keterbatasan akses. Kondisi ini memicu kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat di wilayah kurang berkembang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memengaruhi perubahan sosial dan pola interaksi masyarakat. Kehadiran jalan baru dan kawasan perumahan memicu urbanisasi dan munculnya pusat pertumbuhan baru. Meskipun positif bagi ekonomi, hal ini juga menimbulkan permasalahan sosial jika tidak diimbangi pengendalian tata ruang yang baik, seperti kemacetan, permukiman kumuh, dan ketimpangan ruang. Oleh sebab itu, integrasi antara pembangunan fisik dan kebijakan sosial menjadi penting agar dampaknya dapat dirasakan secara inklusif.

Dari perspektif pemerataan wilayah, kesenjangan pembangunan antar-kecamatan di Kota Serang masih terasa jelas. Data Bappeda Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pembangunan jalan dan fasilitas publik berfokus pada tiga kecamatan inti. Sementara itu, Kasemen dan Walantaka yang memiliki wilayah luas mengalami ketertinggalan dalam akses konektivitas dan pelayanan dasar. Ketimpangan ini berpotensi menghambat perkembangan wilayah pinggiran dan membuat pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di wilayah inti kota. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip spatial equity agar pemerataan pembangunan dapat diwujudkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata tersebut tidak terlepas dari hambatan struktural dan kelembagaan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi sering kali belum optimal sehingga menyebabkan perencanaan bersifat sektoral dan cenderung tumpang tindih. Contohnya, pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembangunan drainase yang memadai. Selain itu, proses tender yang lambat serta lemahnya monitoring di lapangan menyebabkan beberapa proyek mengalami keterlambatan atau hasil pembangunan tidak sesuai rencana. Keterbatasan dalam proses penganggaran juga menjadi hambatan signifikan. Hanya 20% APBD Kota Serang pada tahun 2024 digunakan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur, sementara kebutuhan semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Dari sisi sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur membutuhkan kemampuan teknis perencanaan dan pengawasan yang lebih kompleks, terutama dalam penerapan prinsip berkelanjutan. Namun, ketersediaan tenaga ahli lokal masih terbatas sehingga pemerintah kerap bergantung pada konsultan eksternal, yang berdampak pada meningkatnya biaya dan lamanya durasi pembangunan. Hambatan sosial dan lingkungan juga menjadi tantangan, seperti penolakan masyarakat terkait pembebasan lahan serta pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan warga karena rendahnya partisipasi publik pada proses perencanaan.

Tantangan lain muncul dari aspek ekologi dan tata ruang. Kota Serang memiliki curah hujan cukup tinggi sehingga membutuhkan sistem drainase terpadu. Namun, masih banyak kawasan yang belum memiliki drainase memadai sehingga rawan banjir. Di sisi lain, alih fungsi lahan tanpa perencanaan matang mengancam keseimbangan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Kondisi tata ruang yang belum rapi juga mempersulit pembangunan infrastruktur baru.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah Kota Serang merumuskan sejumlah kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RTRW terbaru. Strategi ini menekankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah, dengan prioritas pada perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jaringan air bersih, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pinggiran. Pemerintah menerapkan kebijakan money follow program, sehingga anggaran diarahkan pada program berorientasi hasil yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan berbasis digital mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan proyek.

Dari sisi pendanaan, pemerintah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terutama pada proyek air bersih dan pengelolaan sampah. Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kementerian untuk memperoleh dukungan dana pada pembangunan infrastruktur strategis seperti transportasi dan sanitasi. Pada saat yang sama, inovasi pembangunan melalui digitalisasi layanan publik mulai dikembangkan melalui konsep smart city guna meningkatkan efisiensi layanan dasar dan mempercepat respons pemerintah.

Dalam perspektif keberlanjutan, pembangunan di Kota Serang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Konsep green infrastructure mulai diterapkan dalam pembangunan ruang terbuka hijau, taman kota, serta drainase ramah lingkungan guna menciptakan ruang kota yang sehat dan produktif. Pemerataan pembangunan juga didorong melalui pengembangan kawasan pinggiran, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan agar pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Evaluasi capaian pembangunan menunjukkan adanya tren positif seperti peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, kenaikan cakupan air bersih, dan semakin mudahnya akses ke fasilitas kesehatan. Namun demikian, capaian tersebut belum merata antarwilayah. Kesenjangan infrastruktur yang terjadi berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Data BPS Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan lebih tinggi di wilayah dengan infrastruktur minim. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Untuk mempercepat pemerataan, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi faktor penting. Pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat dalam proyek strategis seperti peningkatan jalan provinsi, sistem penyediaan air minum regional, dan pengelolaan sampah. Meskipun kolaborasi sudah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih

program dan pemborosan anggaran. Diperlukan sistem koordinasi terpadu berbasis data spasial agar pembangunan dapat berlangsung lebih sinkron dan efisien.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Beberapa program seperti KOTAKU menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dapat mempercepat perbaikan infrastruktur lingkungan. Melalui mekanisme KPBU, sektor swasta turut berperan dalam penyediaan layanan penting seperti air bersih dan pengelolaan sampah. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pembangunan infrastruktur di Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Perkembangan Infrastruktur Kota Serang Berdasarkan Kondisi Jalan (2020-2024)

Tahun	Jalan baik (KM)	Jalan Sedang (KM)	Jalan Rusak (KM)	Jalan Rusak Parah (KM)	Total Jalan (KM)
2020	140	60	8	0	208
2021	150	55	10	1	216
2022	165	50	11	2	228
2023	203	159	41	10	413
2024	220	165	30	5	420

Sumber: LKJIP Kota Serang 2022–2023

Tabel 1.2. Jumlah Kelurahan dan Desa yang Memiliki Akses Infrastruktur Dasar (2020–2024)

Tahun	Jumlah Kelurahan/Desa	Akses Air Bersih%	Akses Sanitasi layak %	Jalam Lingkungan Memadai %
2020	67	72	68	55
2021	67	75	70	58
2022	67	78	73	63
2023	67	82	75	67
2024	67	86	78	72

Sumber: Statistik Potensi Desa Kota Serang, 2024

Tabel 1.3 Anggaran Infrastruktur Kota Serang (2020–2024)

Tahun	Anggaran Infrastruktur (Miliar Rp)	Realisasi %	Fokus Pembangunan
2020	300	82	Pembangunan Drainase & Perbaikan Jalan
2021	350	85	Peningkatan jalan & Sanitasi
2022	410	81	Perbaikan jalan & Air Bersih
2023	520	79	Jalan Kota & Persiapan SPAM Regional
2024	580	86	Transportasi, Air Bersih, Drainase

Sumber: Laporan realisasi APBD Kota Serang & berita Antara Banten 2023–2024

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas adalah data lima tahun terakhir, pembaruan infrastruktur di Kota Serang mengalami peningkatan signifikan terutama pada kondisi jalan, akses air bersih, dan sanitasi. Data jalan menunjukkan peningkatan panjang jalan kondisi baik dari 140 km (2020) menjadi 220 km (2024). Hal ini menunjukkan keberhasilan program peningkatan kualitas jalan yang didukung anggaran infrastruktur yang terus meningkat hingga Rp 580 miliar pada 2024. Akses air bersih juga meningkat dari 72% (2020) menjadi 86% (2024), sejalan dengan laporan BPS melalui publikasi “Statistik Potensi Desa Kota Serang 2024”. Perbaikan sanitasi dan pembangunan drainase turut menurunkan kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Serang bergerak ke arah peningkatan pelayanan dasar yang lebih merata, meskipun masih terdapat ketimpangan antar kecamatan Kasemen dan Taktakan.

Tabel 1.4 Anggaran infrastruktur dan fasilitas yang dibangun tahun 2020-2024
(Simulasi berdasarkan tren laporan pembangunan Kota Serang)

Tahun	Anggaran Infrastruktur (Miliar Rp)	Realisasi %	Fasilitas yang Dibangun/Ditingkatkan
2020	300	82	Perbaikan Jalan Lingkungan 18 km Pembangunan Drainase Utama 2,5 km
2021	350	85	Peningkatan Jalan Kota 22 km Perluasan Jaringan Air Bersih 1.200 us
2022	410	81	Perbaikan Jalan Rusak Sedang 25 km Penyediaan Air Bersih Berbasis 15 unit Rehabilitasi Drainase 3 km

Tahun	Anggaran Infrastruktur (Miliar Rp)	Realisasi %	Fasilitas yang Dibangun/Ditingkatkan
2023	520	79	Pembangunan SPAM Regional Tahap Awal 1 proyek Pengerasan Jalan Desa-Kota 35 km Penguatan Sanitasi Sekolah 12 Sekolah
2024	580	86	Peningkatan Transparansi (halte, 20 fasl Rambu, Jalan) Modernisasi Air Bersih 2.500 Rumah Rehabilitasi Drainase Kota

Berdasarkan tabel 1.4 diatas merupakan peningkatan anggaran infrastruktur Kota Serang menunjukkan tren yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari Rp300 miliar menjadi Rp580 miliar. Kenaikan alokasi ini sejalan dengan perubahan prioritas pembangunan yang pada awalnya berfokus pada perbaikan jalan dan drainase (2020–2022), kemudian bergeser menuju pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional, penguatan sektor transportasi, serta modernisasi jaringan air bersih pada periode 2023–2024. Seiring dengan peningkatan anggaran tersebut, volume fasilitas infrastruktur yang berhasil dibangun juga menunjukkan perkembangan signifikan, terutama pada perluasan layanan air bersih dan pembangunan jalan penghubung antarkawasan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Kota Serang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi, tantangan dan strategi pembangunan infrastruktur di Kota Serang dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran sentral dalam mendukung pemenuhan aksesibilitas pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam aspek transportasi, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Di Kota Serang, keberadaan infrastruktur yang memadai terbukti dapat berkontribusi pada peningkatan mobilitas, efisiensi, ekonomi dan kemudahan akses terhadap pelayanan publik dasar. Namun, manfaat ini belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah kota terutama pada kawasan pinggiran.

Pembangunan infrastruktur di Kota Serang dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya alokasi anggaran dari Rp300 miliar menjadi Rp580 miliar. Peningkatan tersebut diikuti dengan perubahan prioritas pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,

mulai dari perbaikan jalan dan drainase pada tahun-tahun awal hingga pengembangan SPAM regional, modernisasi air bersih, serta penguatan fasilitas transportasi pada periode berikutnya. Selain itu, volume fasilitas yang berhasil dibangun juga mengalami pertumbuhan yang berarti, terutama dalam penyediaan layanan air bersih dan jalan penghubung antarwilayah. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan, meskipun masih diperlukan penguatan tata kelola dan optimalisasi dalam pelaksanaannya.

Kondisi pembangunan infrastruktur Kota Serang menunjukkan kemajuan tetapi masih menghadapi ketimpangan spasial dan sektoral. Beberapa wilayah perkotaan telah menikmati infrastruktur yang baik, sementara wilayah lain masih kekurangan sarana transportasi, air bersih serta fasilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih cenderung terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan dan perdagangan. Kesenjangan sosial ekonomi ini tentunya dapat menghambat tercapainya pemerataan pembangunan.

Pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya partisipasi masyarakat serta kendala teknis di lapangan. Selain itu, masih adanya permasalahan tata ruang, tumpang tindih program, serta kurang optimalnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. Aspek keberlanjutan lingkungan juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Serang juga berupaya untuk menerapkan pendekatan PPP/KPBU untuk memperluas kerja sama dengan lintas instansi serta meningkatkan efektivitas perencanaan berbasis data spasial. Program seperti KOTAKU, pembangunan SPAM regional, serta rehabilitasi jalan lingkungan merupakan contoh langkah untuk memperluas akses pelayanan dasar di Kota Serang namun implementasi dari program-program tersebut perlu ditingkatkan dari sisi efisiensi, pengawasan dan pemerataan hasil.

Secara umum, pembangunan infrastruktur di Kota Serang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi pembangunan masih menjadi tantangan yang besar, oleh karena itu, diperlukan adanya strategi pembangunan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan fisik, tetapi juga inklusivitas sosial, partisipasi masyarakat dan perlindungan lingkungan agar pembangunan dapat benar-benar berkelanjutan.

E. Referensi

- Andi Ahmad Haidi, N. P. (2023). Indonesia Social Progress: The Role of Access to Basic Education in Escaping From Poverty Trap. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 429-457.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *INDIKATOR KONSTRUKSI, TRIWULAN IV-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Indeks Daya Saing Daerah*. Jakarta: BRIN.
- Desri Yesi, E. r. (2024). Tingkat Kemiskinan Harus Diturunkan untuk meningkatkan Akses Layanan Kesehatan. *Indonesian Journal of Health Administration*, 189-197.
- Di, K., & Kotamobagu, K. (2022). *Analisis pengaruh infrastruktur pelayanan dasar terhadap kemiskinan di kota kotamobagu*. 23(3), 271–288.
- Erizal Candra Efendi, y. N. (2025). The Implementation of Smart Cities in Indonesia: A Literature Study on Technology Based Governance and Public Services. (*Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 135-148.
- Karvina Budiwati Apriliani, A. M. (2025). COMMUNITY SATISFACTION INDEX WITH DEVELOPMENT RESULTS OF THE BANTEN PROVINCE PUPR SERVICE FOR DEVELOPMENT WORK AREA II (SERANG CITY, SERANG DISTRICT AND CILEGON CITY) 2024. *INDONESIAN JOURNAL OFSOCIAL SCIENCE RESEARCH*, 221-239.
- Pemerintah Kota Serang. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemeintah (LKjIP) Kota Serang*. Serang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia . (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta.
- Rizkiyani, T., & Rahayu, S. (2025). *Analisis Pembangunan Infrastruktur dalam Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Dasar di Kota Serang*. 22(01).
- Samudra, D. (2024). Strategies Improving Quality of Basic Services as Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Subang International Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 31-34.
- Solu Nor Amaya, A. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 116-126.
- Syarkawi, S., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2023). Village Financial Management In Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(187), 10-24114.
- Tauny Akbari, M. G. (2024). STRATEGI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SERANG BERBASIS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.

JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 1-13.

Tiwi Rizkiyani, S. R. (2025). Analisis Pembangunan Infrastruktur dalam Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Dasar di Kota Serang. *JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1-15.

Wahyu Hidayati, Y. H. (2022). The Development of Economic Infrastructure in Western and Eastern Indonesia to Support People's Welfare Improvement . *The Development of Economic Infrastructure*, 17-26.

Walikota Serang. (2020). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan*. Serang.

Walikota Serang. (2023). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Serang.

Walikota Serang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*. Serang.

Yasir Arafat, R. A. (2025). Analisis Kesenjangan Pembangunan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Studi Kasus Kota Serang dan Desa Cikedung, Kabupaten Serang . *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 189-210.